

APBD tepat waktu dan pengalokasian mandatory spending Kota Prabumulih TA 2025

1. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 Tanggal 30 Desember 2022
2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 Tanggal 28 Desember 2023
3. Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2025 Tanggal 6 Januari 2025

Pengalokasian Mandatory Spending pada belanja pendidikan (20% APBD), kesehatan, dana desa/kelurahan (10% DAU+DBH), belanja infrastruktur (40% DTU) dan belanja pegawai (30%)

1. Belanja Pendidikan TA 2025

7.4.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pendidikan

Mandatory Spending bidang pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Penggunaannya berdasarkan Kepmenkeu No. 35/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.

Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan belanja bidang pendidikan pada TA 2025 adalah sebesar Rp280.207.329.337,00 atau 20,47% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.368.634.335.080,00 dan terealisasi sebesar Rp206.603.528.596,00 atau 73,73% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.12 Alokasi Belanja untuk Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Anggaran Fungsi Pendidikan	280.207.329.337,00	206.603.528.596,00	73,73
2	Total Belanja Daerah	1.368.634.335.080,00	1.133.897.286.358,71	82,85
3	Rasio Anggaran Pendidikan (1 : 2) x 100%	20,47%	18,22%	

2. Belanja Kesehatan TA 2025

7.4.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Kesehatan

Mandatory Spending bidang kesehatan untuk Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan anggaran belanja bidang kesehatan pada TA 2025 sebesar Rp262.701.083.180,00 atau sebesar 28,38% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji sebesar Rp925.560.678.568,40 dan terealisasi sebesar Rp242.923.953.291,00 atau 92,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.13 Alokasi Belanja untuk Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Urusan Bidang Kesehatan			
	a. Belanja Operasi	253.244.547.697,00	233.842.699.063,00	92,34
	b. Belanja Modal	9.456.535.483,00	9.081.254.228,00	96,03
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a + b)	262.701.083.180,00	242.923.953.291,00	92,47
3	Total Belanja Daerah	1.368.634.335.080,00	1.133.897.286.358,71	82,85
4	Gaji ASN	443.073.656.511,60	382.466.197.511,00	86,32
5	Total Belanja Daerah Diluar Gaji ASN (3 - 4)	925.560.678.568,40	751.431.088.847,71	81,19
6	Rasio Anggaran Kesehatan (2 : 5) x 100%	28,38%	32,33%	

Sumber data CALK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota TA 2025 hal 36

3. Belanja Infrastruktur

7.4.4 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Infrastruktur

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan belanja infrastruktur pada TA 2025 sebesar Rp317.109.290.599,00 atau 24,51% dari total anggaran belanja daerah dikurang belanja transfer ke desa yaitu sebesar Rp1.294.000.127.170,00 yang terealisasi sebesar Rp244.512.119.990,27 atau 77,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.15 Alokasi Belanja untuk Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Total Belanja Daerah	1.368.634.335.080,00	1.133.897.286.358,71	82,85
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer ke Desa			
	a. Belanja Bagi Hasil	-	-	
	b. Belanja Transfer ke Desa	74.634.207.910,00	51.446.283.380,00	68,93

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah (a + b)	74.634.207.910,00	51.446.283.380,00	68,93
3	Selisih (1 - 2)	1.294.000.127.170,00	1.082.451.002.978,71	83,65
4	Minimal Belanja Infrastruktur (40% x Selisih)	517.600.050.868,00	432.980.401.191,48	
5	Belanja Modal	196.431.507.985,00	156.203.969.355,27	79,52
	a. Tanah	837.500.000,00	806.951.376,00	96,35
	b. Peralatan dan Mesin	38.403.443.089,00	30.845.127.289,00	80,32
	c. Gedung dan Bangunan	32.709.944.970,00	28.307.505.883,00	86,54
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	120.829.731.326,00	92.877.408.107,27	76,87
	e. Aset Tetap Lainnya	3.650.888.600,00	3.366.976.700,00	92,22
	f. Aset Lainnya	-	-	-
6	Belanja Pemeliharaan	31.125.385.430,00	29.001.111.589,00	93,17
7	a. Belanja Hibah	14.015.189.274,00	7.418.555.666,00	52,93
	b. Belanja Bantuan Sosial	903.000.000,00	442.200.000,00	48,97
	c. Belanja Bantuan Keuangan	74.634.207.910,00	51.446.283.380,00	68,93
8	Jumlah Belanja Infrastruktur (5 + 6 + 7)	317.109.290.599,00	244.512.119.990,27	77,11
	Rasio Belanja Infrastruktur (8 : 3) x 100%	24,51%	22,59%	

Sumber data CALK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota TA 2025 hal 37-38

4. Belanja Pegawai

Tabel 7.54 Belanja Operasi				
Belanja Operasi	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	649.311.048.498,00	574.276.430.762,44	88,44	543.237.553.226,50
Belanja Barang dan Jasa	410.204.087.910,00	343.330.719.195,00	83,70	314.308.023.564,46
Belanja Subsidi	430.800.000,00	430.520.000,00	99,94	864.037.500,00
Belanja Hibah	14.015.189.274,00	7.418.555.666,00	52,93	40.018.603.276,50
Belanja Bantuan Sosial	903.000.000,00	442.200.000,00	48,97	258.720.000,00
Jumlah	1.074.864.125.682,00	925.898.425.623,44	86,14	898.686.937.567,46

Sumber data CALk atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota TA 2025 hal 97